

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pelopor utama dalam pembangunan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor. Karena kedudukan UMKM yang sangat penting saat ini pemerintah terus memaksimalkan potensi para pemuda dengan memberikan peluang seluas-luanya bagi pemuda untuk terus mengembangkan diri di dunia usaha, termasuk ekonomi kreatif. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dan menjadi salah satu penggerak perekonomian serta memiliki jumlah yang paling besar. Kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 membuktikan bahwa UMKM mampu berdiri kokoh ketika perusahaan-perusahaan besar bangkrut.

Peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada perekonomian Indonesia bisa dilihat pada kedudukannya saat ini dalam dunia usaha. Keberadaannya pada perekonomian Indonesia sangat dominan dan signifikan. Ada tiga indikator yang menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia sangat penting yaitu, pertama jumlah industri yang besar dan terdapat di dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensi UMKM yang besar di dalam penyerapan tenaga kerja. Ketiga, kontribusi UMKM di dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia lebih besar

dari berbagai perusahaan lain di Indonesia karena UMKM mempunyai asas Otonomi. Dekonsentrasi menerapkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. dan tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota kepada desa untuk melakukan tugas tertentu. Konsep ketiga tersebut mengharapkan pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerahnya secara kelebihan yang tidak dimiliki perusahaan, yaitu produk yang dimiliki adalah produk lokal dan daya serap tenaga kerja yang tinggi. (Wijaya, 2018).

Pada dasarnya UMKM memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan kredit untuk tambahan modal. Hingga saat ini banyak program pembiayaan bagi UMKM baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh perbankan. Salah satu program pemerintah Indonesia terkait pembiayaan UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM, sebab selama ini banyak UMKM yang terkendala untuk akses terhadap perbankan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan (Basri dan Nugroho, 2009). Namun pada prakteknya realisasi KUR jauh dari target karena bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR masih terlalu berhati-hati dalam penyaluran kredit terkait tidak adanya akses informasi yang memadai terkait kondisi UMKM. Mayoritas pengusaha UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya sehingga membuat informasi tersebut menjadi lebih mahal bagi perbankan (Baas dan Schrooten, 2006).

Masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM antara lain pendanaan, pemasaran produk, teknologi, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pengelolaan keuangan, dan yang sering kali terabaikan oleh pelaku UMKM adalah masalah pengelolaan keuangan. Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya pencatatan keuangan dan pembukuan yang rapi. Dengan adanya pembukuan, pelaku usaha bisa mengetahui sehat atau tidaknya usaha mereka. Akuntansi berpengaruh bagi kinerja usaha UMKM untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Dalam pencatatan akuntansi, informasi yang disediakan berguna bagi pengambilan keputusan, dan bisa meningkatkan pengelolaan usaha.

Pentingnya penerapan akuntansi bagi UMKM maka IAI selaku organisasi profesi sekaligus sebagai bahan penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyusun standar akuntansi sesuai dengan karakteristik UMKM. Pada tahun 2009, DSAK telah mengesahkan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang berlaku efektif per 1 Januari 2011. SAK ETAP merupakan standar akuntansi untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas kepada publik. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP perusahaan kecil dan menengah mampu menyusun laporan keuangannya untuk mendapatkan dana dan pengembangan usaha. Namun, standar ini masih dirasa sulit untuk diterapkan oleh UMKM sehingga IAI menyiapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang telah disahkan pada tanggal 24 Oktober 2016 dan rencananya akan berlaku efektif per 1 Januari 2018. (Hetika & Nurul Mahmudah, 2017)

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses siklus akuntansi yang berisi tentang catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Manfaat penyusunan laporan keuangan dapat menghasilkan suatu keputusan ekonomi yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. (Aini & Order, 2016).

Batam dikenal sebagai kota industri dan dagang, namun dalam beberapa tahun terakhir banyak perusahaan yang gulung tikar dan mengakibatkan banyak pengangguran dan beberapa diantara mereka memilih untuk membuka usaha sendiri. Berdasarkan data pelaku usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terdapat 248 pelaku usaha yang mendaftarkan diri yang mengembangkan jenis usaha di bidang industri dan perdagangan. Namun pelaku usaha lebih banyak bergelut di bidang industri sebanyak 239 usaha yang terdiri dari jenis usaha makanan/minuman, kerajinan, hasil pertanian dan perkebunan, jasa, dan kosmetik/obat, dan di bidang perdagangan berjumlah 9 usaha yang dapat kita lihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jenis dan Jumlah Sektor Usaha Pada Usaha Mikro Kota Batam

No.	Sektor Industri	Jumlah	Sektor Perdagangan	Jumlah
1.	Makanan/Minuman	182	Dagang	9
2.	Kerajinan	40		
3.	Hasil Pertanian	1		
4.	Hasil Perkebunan	1		
5.	Jasa	13		
6.	Kosmetik dan Obat	2		
	Jumlah	238	Jumlah	9

Sumber: Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam

Penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu tentang penerapan akuntansi dan SAK ETAP, diantaranya : Neneng Salmiah, Indarti & Inova Fitri Siregar (2015) dalam penelitiannya tentang Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (Pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop & UMKM Kota Pekanbaru) didapat bahwa bentuk penerapan akuntansi pada UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru masih sangat sederhana atau tidak mengikuti tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi dan penerapan akuntansinya rata-rata belum sesuai dengan SAK ETAP.

Peneliti selanjutnya Yuli (2016) tentang Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada Toko Pakaian di Gajah Mada Plaza Malang, didapat bahwa pelaku UKM di GMP Malang tidak berkeinginan melakukan pelatihan di bidang akuntansi. Hal ini dikarenakan pandangan responden bahwa tanpa memahami akuntansi usaha tetap berjalan dan yang penting tidak mempengaruhi laba. Dengan demikian pelaku UKM tidak mempunyai motivasi untuk memajukan usahanya supaya lebih berkembang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hetika dan Nurul (2017) tentang Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK ETAP Pada UMKM Kota Tegal didapat bahwa, penerapan akuntansi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM Kota Tegal masih sangat sederhana dan para pelaku UMKM di Kota Tegal belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP disebabkan karena kurangnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai SAK ETAP.

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa setiap UMKM harus menyajikan pembukuan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENERAPAN AKUNTANSI DAN KESESUAIANNYA DENGAN SAK ETAP PADA UMKM KOTA BATAM”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas sehingga peneliti melakukan identifikasi masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Banyaknya pelaku UMKM yang beranggapan akuntansi adalah satu hal sangat sulit, dan pencatatan keuangan membutuhkan kecermatan, waktu, tenaga, dan juga biaya.
2. Pelaku UMKM jarang yang melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Mereka cenderung mengandalkan ingatan untuk mengingat dan transaksi yang terjadi pada usaha mereka.
3. Para pelaku UMKM merasa kurang membutuhkan informasi akuntansi karena mereka sudah terlibat secara pribadi dan langsung dalam kegiatan usahanya.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan dikarenakan keterbatasan waktu dan minimnya pengetahuan peneliti sehingga dilakukan pembatasan masalah, peneliti memfokuskan penelitian pada penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada usaha mikro Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada usaha mikro kota Batam?
2. Bagaimana pemahaman akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada usaha mikro kota Batam?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada usaha mikro kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada usaha mikro Kota Batam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada usaha mikro Kota Batam.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada usaha mikro kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan mengenai penerapan proses akuntansi pada UMKM Kota Batam dalam rangka penerapan teori-teori yang didapatkan di bangku kuliah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan objek ataupun masalah yang sama dimasa yang akan datang maupun untuk penelitian lanjutan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Akademis

Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi perpustakaan dan memberi manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian lebih lanjut.

2. Bagi Pihak UMKM

Diharapkan dapat memberikan pemikiran dan masukan untuk mengetahui besarnya manfaat melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan untuk mendapatkan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan.